

Peran Pemuda Sebagai Agen Perubahan Dalam Melawan Korupsi

**Belinda Aggrean¹, Fania Agung Prianti², Melvi Patrisia Alfarid³, Mutia Apifa Amelia⁴
Salsabilla Erika Dwi Putri⁵, Salsha Sabilla⁶, Tasya Humayra Salsyabila⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

angreanbelinda@gmail.com¹, faniaaggunprianti@gmail.com², melvipatrisia@gmail.com³,
mutiaapifa05@gmail.com⁴, salsabillaerikadwiputri@gmail.com⁵, salshasabilla20@gmail.com⁶,
tasyahumayrasalsyabila@gmail.com⁷

Abstract

This article discusses the role of youth as agents of change in the fight against corruption in Indonesia. Corruption poses a serious threat to national development across various sectors. The research method employed is a normative legal approach, analyzing relevant legal regulations and literature. The discussion covers the strategic role of youth in anti-corruption education, the socialization of values such as honesty, and the use of digital technology to enhance public participation. Additionally, artistic and cultural approaches are explored as tools to inspire society to resist corruption. The conclusion emphasizes that collaboration among youth, government, and society is crucial for creating a transparent and accountable environment, ultimately leading to a corruption-free Indonesia.

Kata Kunci:

Pemuda
Korupsi
Agen Perubahan

Abstrak

Artikel ini membahas peran pemuda sebagai agen perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi menjadi ancaman serius yang menghambat pembangunan nasional di berbagai sektor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan hukum dan literatur yang relevan. Pembahasan mencakup peran strategis pemuda dalam pendidikan antikorupsi, sosialisasi nilai-nilai kejujuran, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, pendekatan seni dan budaya juga dibahas sebagai alat untuk menginspirasi masyarakat dalam melawan korupsi. Kesimpulan menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, serta mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Corresponding Author:

Salsabilla Erika Dwi Putri
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Riau
Email: salsabillaerikadwiputri@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi menjadi salah satu masalah utama yang terus menghambat kemajuan masyarakat dan pembangunan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai moral, menciptakan ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Imbasnya merembet ke berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, di mana dana publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kerap disalahgunakan demi kepentingan segelintir individu. Kondisi ini semakin memperbesar

kesenjangan dan memperlambat tercapainya cita-cita keadilan sosial. Dalam situasi seperti ini, upaya kolektif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan, termasuk peran penting generasi muda sebagai motor penggerak perubahan (Rasyidi, 2014).

Generasi muda memiliki potensi luar biasa untuk membawa perubahan. Dengan idealisme, semangat, dan kreativitas yang dimiliki, mereka dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan sistem yang lebih bersih dan transparan. Di era digital saat ini, akses pemuda terhadap informasi semakin luas, sehingga mereka dapat memahami dampak buruk korupsi secara lebih mendalam (Atmoko & Syauket, 2022). Teknologi juga menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan pemuda dalam memantau, melaporkan, dan mengadvokasi pemberantasan korupsi. Namun, peran ini hanya dapat maksimal jika disertai dengan kesadaran, tekad, dan langkah nyata dari setiap individu muda untuk turut berkontribusi dalam memutus rantai korupsi yang sudah mengakar.

Korupsi sering kali tumbuh subur karena lemahnya pengawasan, transparansi yang minim, serta budaya permisif yang telah lama melekat dalam masyarakat (Ummah, 2019). Dalam hal ini, pemuda bisa menjadi ujung tombak dalam mengubah pola pikir dan budaya yang cenderung membiarkan praktik korupsi. Salah satu caranya adalah dengan mempromosikan edukasi antikorupsi yang berkesinambungan, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan-kegiatan informal. Generasi muda dapat terlibat aktif dalam berbagai program yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab di lingkungan sekitar mereka, seperti keluarga, komunitas, hingga institusi pendidikan. Dengan langkah ini, pemuda tidak hanya mampu memahami bahaya korupsi tetapi juga termotivasi untuk menjadi bagian dari solusi.

Selain itu, pemuda dapat mengambil peran langsung dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan bergabung dalam organisasi masyarakat sipil atau komunitas antikorupsi, pemuda dapat turut memantau penggunaan anggaran publik dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah berjalan dengan baik. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menciptakan platform yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan kasus korupsi dengan mudah dan aman. Inovasi seperti ini tidak hanya memperluas partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara.

Keterlibatan pemuda dalam dunia politik juga menjadi aspek yang tak kalah penting. Sebagai generasi yang akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan, pemuda harus dipersiapkan untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka perlu dilatih agar mampu mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan publik. Dengan keberanian dan komitmen yang dimiliki, pemuda dapat mendorong reformasi sistem untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi mendapat tempat di berbagai lapisan birokrasi (Ummah, 2019).

Meski begitu, perjalanan pemuda dalam melawan korupsi tentu tidak bebas dari tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya kesadaran di kalangan pemuda sendiri terhadap pentingnya integritas dan upaya pemberantasan korupsi. Tidak sedikit yang masih menganggap bahwa korupsi adalah isu yang hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik-praktik koruptif juga menjadi hambatan yang harus diatasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemuda yang berusaha melawan korupsi sering menghadapi intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan solidaritas dan dukungan yang kuat di antara pemuda untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Pemerintah dan institusi lainnya juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pemuda untuk menjalankan perannya sebagai agen perubahan. Program-program pemberdayaan seperti pelatihan antikorupsi, kampanye kesadaran publik, serta inisiatif pengembangan kapasitas harus menjadi prioritas utama. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya lingkungan yang mendukung bagi pemuda untuk mengekspresikan pendapat dan gagasan mereka tanpa rasa takut. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga penting untuk membangun gerakan antikorupsi yang lebih inklusif dan efektif (Sanjaya, 2017).

Pemuda adalah masa depan bangsa, dan harapan besar diletakkan pada mereka untuk membawa perubahan yang signifikan. Dengan memanfaatkan energi, kreativitas, dan semangat juang yang mereka miliki, generasi muda memiliki kekuatan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Namun, keberhasilan ini memerlukan kesadaran kolektif, komitmen yang teguh, serta sinergi antara pemuda dan berbagai pihak terkait. Melalui upaya pendidikan, advokasi, dan tindakan nyata, pemuda dapat menjadi penggerak utama dalam membangun masyarakat yang bersih, adil, dan berintegritas.

Perjuangan untuk memberantas korupsi memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Namun, jika pemuda dapat berperan aktif dan konsisten dalam gerakan ini, maka harapan untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan transparan bukanlah hal yang mustahil. Generasi muda harus menyadari bahwa masa depan bangsa ada di tangan mereka, dan mereka memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan perubahan. Dengan semangat dan dedikasi yang mereka miliki, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang mengatur peran pemuda dalam upaya pemberantasan korupsi. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum utama, seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel, dan pendapat para pakar hukum (Muhammad, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, konsep-konsep dasar, serta posisi strategis pemuda dalam melawan korupsi melalui pendekatan sistematis terhadap norma hukum yang berlaku. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020), dengan melakukan pengumpulan, penyusunan, dan evaluasi terhadap

bahan-bahan hukum tersebut. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan temuan yang jelas dan menyeluruh (Aris Dwi Cahyono, 2021). Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dasar hukum, kendala, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemuda dalam berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi (Sari & Asmendri, 2020).

3. PEMBAHASAN

Korupsi merupakan persoalan serius yang mengancam keberlanjutan pembangunan bangsa Indonesia, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam berbagai kajian, korupsi dinilai telah menghambat semua aspek sistem asta gatra yang menjadi dasar ketahanan nasional. Meski reformasi 1998 memberikan harapan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama melalui kebijakan Otonomi Daerah, pelaksanaannya justru memperparah situasi dengan menyebarkan praktik korupsi ke tingkat daerah. Data menunjukkan bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi, mencerminkan bagaimana desentralisasi pemerintahan malah menciptakan peluang bagi "raja-raja kecil" di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan partisipatif (Putra & Linda, 2022).

Pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, memegang peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Peran mereka tidak hanya didasarkan pada sejarah keterlibatan pemuda dalam berbagai perubahan besar bangsa ini, tetapi juga pada potensi mereka untuk menjadi agen perubahan sosial. Dalam perspektif teori peran yang diungkapkan oleh Soekanto (2009), pemuda memiliki tanggung jawab sosial yang melekat pada status mereka sebagai motor penggerak transformasi masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran ini dapat diwujudkan melalui berbagai langkah pencegahan, pendidikan, dan pengawasan. (Koesdaryono, 2011)

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemuda adalah melaksanakan pendidikan anti-korupsi. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Pendidikan semacam ini tidak hanya dapat dilakukan secara formal di sekolah atau universitas, tetapi juga melalui program-program pelatihan dan kampanye kesadaran publik. Sebagai contoh, Satgas Muda Anti Korupsi di Kota Yogyakarta telah menunjukkan peran signifikan dalam membangun karakter masyarakat yang anti-korupsi, sebagaimana dijelaskan oleh Widiatmaka dkk. (2016). Gerakan mereka bersifat berkelanjutan, tidak hanya muncul saat ada kasus korupsi tertentu, tetapi terus mengedukasi masyarakat melalui pendekatan holistik (Luh Putu Swandewi Antari, 2022).

Selain pendidikan, sosialisasi nilai-nilai anti-korupsi juga menjadi langkah penting yang dapat dilakukan oleh pemuda. Sosialisasi ini mencakup penyebaran informasi terkait bahaya korupsi dan pentingnya pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial oleh generasi muda dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperluas jangkauan kampanye anti-korupsi. Dalam penelitian terbaru, digitalisasi telah terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi. Dengan begitu, peran pemuda sebagai agen perubahan dapat terwujud secara nyata dalam ruang publik yang lebih luas (Satria, 2020).

Ketiga, pemuda dapat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Peran ini menjadi sangat relevan di era Otonomi Daerah, di mana desentralisasi kekuasaan membuka celah bagi praktik korupsi di tingkat daerah. Menurut Savitri (2014), ketahanan wilayah dapat diwujudkan melalui pengelolaan prinsip-prinsip sosial yang mencakup pengawasan terhadap tata kelola pemerintah. Dalam hal ini, pemuda dapat membentuk organisasi-organisasi pemantau independen yang fokus pada audit publik, keterbukaan informasi, dan pengawasan anggaran. Keberadaan organisasi seperti ini tidak hanya membantu mengungkap kasus korupsi, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Dewi, 2022).

Pemuda juga memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat pemberantasan korupsi. Inovasi dalam teknologi informasi, seperti aplikasi pelaporan korupsi atau platform digital untuk memantau proyek pemerintah, dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Studi dari Wahyuni (2012) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berbasis komunitas mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu korupsi dan memberikan ruang bagi partisipasi yang lebih

inklusif. Dengan kemampuan pemuda dalam menguasai teknologi, mereka memiliki posisi yang unik untuk menjadi penggerak transformasi digital dalam pemberantasan korupsi.

Lebih jauh, penguatan karakter pemuda juga menjadi elemen penting dalam peran mereka sebagai agen perubahan. Menurut Hadi (2010), korupsi telah merasuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat, sehingga upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari pembentukan karakter individu yang kuat. Karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama harus menjadi nilai-nilai utama yang ditanamkan sejak dini. Gerakan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dan KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta menjadi contoh bagaimana penguatan karakter masyarakat dapat membawa perubahan besar bagi bangsa (Adolph, 2016).

Korupsi merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan, fenomena ini tetap saja tumbuh subur. Korupsi telah mengakar dalam berbagai aspek, mulai dari sistem pemerintahan, ekonomi, politik, hingga tatanan sosial masyarakat. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa langkah-langkah luar biasa dibutuhkan untuk memerangi korupsi, melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk pemuda sebagai agen perubahan (Ghita, 2019).

Pemuda selalu memegang peran strategis dalam sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari pergerakan kebangsaan, perjuangan kemerdekaan, hingga reformasi, kontribusi pemuda tidak bisa disangkal. Sebagai generasi yang memiliki energi besar, semangat, dan pemikiran kritis, pemuda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi (Gani & Resa, 2018). Dalam konteks ini, peran pemuda bukan hanya menjadi pelengkap, melainkan kunci dalam membangun bangsa yang bersih dan bebas korupsi.

Korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup berbagai tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Upaya memberantasnya mencakup aspek pencegahan, penindakan, serta pelibatan masyarakat. Peran pemuda sangat dominan dalam aspek pencegahan, di mana mereka dapat berperan aktif melalui pendidikan, kampanye, dan berbagai program kreatif yang bertujuan membangun budaya antikorupsi (C, 2008).

Pendidikan merupakan landasan utama dalam membentuk karakter individu. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah perilaku koruptif sejak dini. Institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi, memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda. Mahasiswa sebagai bagian dari lingkungan akademik memiliki posisi yang strategis dalam menyuarakan nilai-nilai tersebut. Kurikulum pendidikan antikorupsi dapat dijadikan salah satu pendekatan untuk mencetak generasi yang sadar dan peduli terhadap bahaya korupsi.

Dalam penerapannya, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan materi terkait pencegahan korupsi. Tidak hanya dalam bentuk teori, tetapi juga melalui praktik, seperti simulasi investigasi kasus korupsi dan pengenalan proses hukum yang melibatkan masyarakat. Langkah ini tidak hanya menciptakan mahasiswa yang paham tentang korupsi, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan perubahan di masyarakat (Kenneth, 2024).

Selain pendidikan formal, pemuda dapat memainkan peran penting dalam menyosialisasikan gerakan antikorupsi melalui berbagai media. Kehadiran teknologi dan media sosial memberikan peluang besar bagi pemuda untuk menyuarakan kampanye antikorupsi secara lebih luas. Dengan kreativitas yang dimiliki, mereka dapat memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten yang inspiratif, seperti video pendek, lagu, poster, atau cerita yang mengangkat isu korupsi (*JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI* (VOL 4, No 02, 2023) 25, 2024). Kampanye yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi.

Namun, perjuangan melawan korupsi tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama adalah sikap permisif yang masih ada di masyarakat terhadap tindakan korupsi. Banyak orang yang masih menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah atau bahkan tidak menyadari dampaknya secara langsung. Oleh karena itu, pemuda harus menjadi pionir dalam mengubah pola pikir tersebut. Dengan menyuarakan nilai-nilai integritas dan antikorupsi, mereka dapat memengaruhi masyarakat untuk turut serta dalam gerakan ini.

Tidak hanya itu, pemuda juga dapat mengimplementasikan gerakan antikorupsi melalui pendekatan seni dan budaya. Seni memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan moral secara universal, sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, dengan menciptakan lagu-lagu yang bertemakan antikorupsi, membuat film pendek yang menggambarkan dampak korupsi, atau mengadakan pameran seni bertema integritas (Achmad Asfi Burhanudin, 2019). Pendekatan ini tidak hanya mendidik, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi.

Korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan menunjukkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi tidak hanya berada di tingkat pusat, tetapi juga menyebar hingga ke daerah. Dalam situasi seperti ini, peran pemuda di daerah menjadi sangat penting. Mereka dapat memulai dengan

mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat lokal, seperti pelaksanaan anggaran dan kebijakan publik. Keterlibatan aktif pemuda dalam pengawasan ini dapat membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel (Putra & Linda, 2022). Di sisi lain, tekanan atau ancaman terhadap mereka yang berani bersuara juga menjadi tantangan serius. Banyak pemuda yang merasa takut atau ragu untuk menyuarakan kebenaran karena adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Dalam situasi ini, dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi antikorupsi sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi para pejuang antikorupsi.

Pemberantasan korupsi juga membutuhkan sinergi dari seluruh elemen bangsa. Tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau institusi penegak hukum semata. Pemuda, sebagai bagian dari masyarakat, harus terus bergerak bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberantasan korupsi. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, termasuk pemuda, menjadi kunci utama dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Dalam jangka panjang, peran pemuda dalam pemberantasan korupsi tidak hanya berkontribusi pada pembangunan bangsa, tetapi juga pada ketahanan nasional. Korupsi yang meluas dapat merusak sistem pemerintahan dan memengaruhi stabilitas suatu negara. Dengan keterlibatan aktif pemuda, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas (Dewi, 2022).

Sebagai penutup, pemuda memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam melawan korupsi. Dengan semangat, kreativitas, dan pemikiran kritis yang dimiliki, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa bangsa ini menuju kehidupan yang lebih baik. Pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen dan kerja sama seluruh elemen masyarakat, harapan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi bukanlah sesuatu yang mustahil. Pemuda harus terus bergerak, berjuang, dan menjadi inspirasi bagi bangsa ini (Kenneth, 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Peran pemuda sebagai agen perubahan dalam melawan korupsi sangat penting dan strategis. Dengan melibatkan pemuda dalam pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi, diharapkan budaya antikorupsi dapat terbangun secara menyeluruh di masyarakat. Meski menghadapi berbagai tantangan, semangat dan komitmen pemuda dalam melawan korupsi harus terus didukung oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dalam jangka panjang, peran aktif pemuda tidak hanya membantu memberantas korupsi, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah dan nasional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa, dengan pemuda sebagai garda terdepannya.

4.2 Saran/Rekomendasi

Untuk secara efektif mengatasi masalah korupsi, partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda, sangatlah penting. Pemuda harus diberikan pengetahuan yang mendalam mengenai bahaya dan dampak korupsi melalui berbagai program pendidikan yang bisa dijalankan di sekolah maupun universitas. Selain itu, pemuda juga perlu diberdayakan untuk turut serta dalam gerakan sosial yang mempromosikan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi, baik melalui kegiatan edukasi maupun melalui platform media sosial dan kegiatan kreatif lainnya. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus diperkuat untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel. Dengan semangat dan komitmen yang kuat dari generasi muda, Indonesia bisa bergerak menuju masyarakat yang bebas dari praktik korupsi.

REFERENSI

- Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 78–95. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.40>
- Adolph, R. (2016). *Korupsi di Indonesia*. 6(5), 1–23.
- Aris Dwi Cahyono. (2021). (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3(2), 28–42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- C. (2008). 1108-Article Text-2205-1-10-20140905.pdf. In *Jurnal Hukum* (Vol. 26, Issue 1).
- Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 123–132.

- Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 05(01), 317–329.
- Gani, A. W., & Resa, J. (2018). Prosiding Seminar Nasional: Peranan Mahasiswa dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding Seminar Nasional*, 641–643. <https://www.merdeka.com/peristiwa/>
- Ghita, M. (2019). *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Tingkat Ekonomi Tentang Kejadian Stunting*, 3(2), 14–15.
- JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPcHI (VOL 4, No 02, 2023) 25.* (2024). 4(02), 25–49.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Koesdaryono, K. (2011). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan*, 6(11), 23–41. <https://doi.org/10.55745/jpstipan.v6i11.103>
- Luh Putu Swandewi Antari. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), 70–84. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4661>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 134.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Impact of Social Change on Society From the Crime of Corruption. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Rasyidi, M. A. (2014). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2), 38.
- Sanjaya, W. (2017). Jurnal de Jure. *Jurnal de Jure*, 9(2), 114–129. <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/13/0786345>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Ummah, M. S. (2019). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI